

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Politik

#### 1. Sejarah politik di Indonesia

Politik berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang artinya negara-kota. Dalam Negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan-menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>1</sup> Aristoteles memaknai politik sebagai aktivitas mulia dan mencerahkan, sehingga, politik yang berada dalam karakteristik kegiatan publik menjadi sesuatu yang baik. Sementara John Stuart Mill berpendapat bahwasanya politik merupakan kegiatan publik yang bermanfaat untuk memberikan edukasi yang dapat mempromosikan mengenai nilai-nilai moral, personal dan intelektual untuk pengembangan dari individu itu sendiri.<sup>2</sup>

Republik Indonesia (selanjutnya disebut Indonesia) merupakan suatu entitas politik dengan platform *Nation-state* (Negara-Bangsa) atau lebih dikenal negara berbentuk *Unitary State* (Negara-Kesatuan) dan Republik yang memerdekakan dirinya dari penjajahan Imperium Kekaisaran Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.<sup>3</sup>

Adapun jika membahas sejarah atau perkembangan perpolitikan di Indonesia, tentu tidak langsung membahas sistem-sistem politiknya. Indonesia sendiri telah mengalami dinamika perpolitikannya mulai dari era perjuangan hingga era saat ini. Para pakar politik telah mengklasifikasi fase-fase sejarah

---

<sup>1</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*: (Basri, 2006) (Rusfiana & Nurdin, 2017)[*An Introduction to Political Science*] (Yogyakarta:Indie Book Corner), 2.

<sup>2</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 2.

<sup>3</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 49-50.

dan perkembangan politik di Indonesia. Agar lebih mudah, penulis memakai istilah yang digunakan Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin.

a. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Berdasarkan pada UUD tahun 1945 dinyatakan bahwasanya Indonesia adalah “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dan dilanjutkan pada Ayat 2 yang menyatakan bahwasanya “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”. kedua keterangan tersebut memberikan keterangan bahwasanya identitas negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan ciri karakteristik khasnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>4</sup>

b. Era Demokrasi Parlemerter (1950-1959)

Era Demokrasi Parlemerter merupakan era di mana perjuangan era kemerdekaan Indonesia telah berhasil melalui serangkaian permasalahan eksternal dan internal yang selama ini menjadi ancaman utama bagi eksistensi RI.<sup>5</sup>

Pada era sistem politik Indonesia ini telah menuju kepada arah-arrah perilaku atau kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintahan secara kontitusional.<sup>6</sup>

c. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

---

<sup>4</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 49.

<sup>5</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 66.

<sup>6</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 66-67.

Era demokrasi terpimpin merupakan bentuk di mana negara dan pemerintahan masih bertahan pada sistem kesatuan serta republic namun terjadi perubahan pada sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden Soekarno tampil sebagai pemimpin utama dengan dibantu Perdana Menteri dan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.

Pada era ini terjadi beberapa peristiwa politik yang menjadi peristiwa besar dan berpengaruh terhadap sistem politik yang berlangsung diantaranya adalah Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan Tragedi G30S.<sup>7</sup>

d. Era Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru merupakan tatanan pemerintahan yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga tahun 1998.<sup>8</sup>

Masa Orde Baru diawali dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden melalui Supersemar. Pada masa ini, pemerintah bertekad untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem yang ditetapkan adalah Demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Pada era ini, kepemimpinan atau kekuasaan Presiden sangat besar dalam mengatur dan menopang seluruh proses politik, yang mengakibatkan terjadinya sentralistik kekuasaan pada masa presiden.<sup>9</sup>

Robert Hefner berkata, sebagaimana dikutip Sahaya Anggara, bahwa ada yang mengatakan kemenangan Orde Baru merupakan kemenangan “orang Jawa” karena para elite Orde Baru dibesarkan dalam lingkungan Hindu-Jawa

---

<sup>7</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 69.

<sup>8</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 73.

<sup>9</sup> Sahaya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA 2013), 33.

sehingga menjadikannya lebih kuat dari yang lain. Permusuhan elit penguasa Islam mendorong pemerintah untuk melarang kembali Masyumi pada tahun 1966, serta membatasi peran partai Islam dan menggabungkannya ke dalam PPP pada tahun 1973. Elit Orde Baru cenderung berkoalisi dengan orang-orang Cina Katolik, bekas anggota PSI, dan sejumlah perwira militer yang anti-Islam, dengan Ali Murtopo, pendiri CSIS, berperan penting dalam merancang kebijakan Orde Baru. Pada Sidang Umum MPR 1973, usulan untuk mengakui aliran kepercayaan sebagai agama menyebabkan kontroversi di kalangan umat Islam.<sup>10</sup>

e. Era Reformasi (1999-Kini)

Era ini dimulai sejak lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998, setelah berkuasa selama 32 tahun. Bangku presiden kemudian diserahkan kepada Wakilnya yaitu B.J. Habibie. Era ini juga salah satu fase terbesar dalam sejarah sistem politik di Indonesia berkaitan dengan perubahan konstitusi dasar dan perihal-perihal ke tata pemerintahan dan Pembangunan demokrasi yang terus menemukan bentuk penyesuaian yang lebih baik.<sup>11</sup>

Perubahan tersebut yakni dengan tujuan menyempurnakan aturan dasar pada pokok-pokok ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan prinsip demokrasi, penjunjungan asas negara hukum, serta hal-hal lainnya yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sahaya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 33.

<sup>11</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 76.

<sup>12</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, 77-78

## 2. Partai politik

### a. Konsep Pengertian Partai Politik

Partai politik secara umum adalah salah satu mekanisme utama yang menghubungkan pemilih dengan institusi pemerintah. Selain itu, partai politik juga berurusan dengan keberlanjutan dari masyarakat dan memfokuskan diri pada perilaku dan pilihan pemilih, serta memainkan peran utama seperti penominasian calon untuk jabatan politik tertentu, mengorganisasikan, dan mendanai kampanye pemilu.<sup>13</sup>

Sedangkan Neumann berpendapat bahwasanya partai politik adalah perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.<sup>14</sup>

Mengutip dari Lapalombara dan Weiner, Firmanzah menambahkan bahwa, partai politik setidaknya memiliki empat unsur utama, yakni organisasi yang terlembaga dan berkelanjutan, memiliki struktur hierarkis dari tingkat pusat hingga ranting, mewakili kepentingan rakyat melalui penggunaan kekuasaan, serta berupaya meningkatkan elektabilitas dengan meraih suara.<sup>15</sup>

Dalam prosesnya, partai politik juga menjadi sebuah wadah terhadap gagasan keikutsertaan rakyat dalam proses politik. Ini menjadi dasar bagi partai politik terbentuk dan berkembang bahkan menjadi lambang sebuah negara penganut demokrasi hingga komunis. Di negara dengan sistem

---

<sup>13</sup> Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*. (Jakarta: Buku Kompas, 2015), 127

<sup>14</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 454.

<sup>15</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 68-69.

totaliter, partai politik digunakan sebagai alat oleh elite untuk memobilisasi masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Partai politik dalam sistem politik komunis dan fasis memiliki basis kader yang militan dengan struktur organisasi yang hirarkis. Dengan demikian, partai politik di negara demokrasi bersifat sebagai pemersatu aspirasi rakyat melalui pemilu, sedangkan dalam sistem totaliter, partai politik menjadi alat negara untuk memobilisasi rakyat dan menundukkan mereka pada keputusan partai.<sup>16</sup>

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Di dalam sistem politik demokrasi, partai politik mencapai dan mempertahankan kekuasaan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, sementara dalam sistem politik totaliter, partai tunggal menggunakan paksaan fisik dan psikologis untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.<sup>17</sup>

Ketika melaksanakan fungsi tersebut, partai politik demokrasi melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu; seleksi calon, kampanye, dan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif). Setelah memperoleh kekuasaan, partai politik berperan sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik minoritas memiliki peran sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Di sistem politik totaliter, pemilihan umum berfungsi sebagai

---

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 115-116.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 115-116.

pengesahan calon tunggal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh partai tunggal. Selain itu, partai politik juga menjalankan fungsi lainnya dalam kedua sistem politik tersebut. Kendati demikian, partai politik, baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga menjalankan sejumlah fungsi lainnya.<sup>18</sup>

*Pertama, Rekrutmen Politik:* partai politik melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus. Secara internal fungsi rekrutmen politik adalah untuk mendapatkan kader-berkualitas. Sehingga mampu bersaing dalam bursa kepemimpinan nasional.

*Kedua, Partisipasi Politik:* merupakan sarana untuk kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui Pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

*Ketiga, Komunikasi Politik:* Lucian W. Pye mengungkapkan bahwa Komunikasi Politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

*Keempat, Sarana Pengatur Konflik:* partai politik menjadi pembantu untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik,

---

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 117-120.

perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik.

c. Tipologi Partai Politik

Tipologi Partai Politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu. Di bawah ini diuraikan sejumlah tipologi partai politik:<sup>19</sup>

1) Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik di klasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiganya meliputi partai politik pragmatis, doktriner, dan kepentingan. *Pertama*, Partai Politik Pragmatis. *Pertama*, Partai Politik Pragmatis adalah adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. *Kedua*, Partai Doktriner. Adalah suatu partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang konkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan dalam bentuk program dan diawasi secara ketat oleh aparat partai. *Ketiga*, Partai Kepentingan. Partai Kepentingan merupakan suatu Parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin ikut berpartisipasi.

---

<sup>19</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik, Edisi Kedua* (Depok: Rajawali Perss, 2017), 152.

## 2) Komposisi dan Fungsi Anggota

Jenis kedua dari tipologi ini terbagai menjadi dua. Pertama, Partai Massa atau Lindungan (Patronage). Partai massa atau lindungan adalah partai yang mengandalkan kekuatan jumlah anggota untuk memobilisasi massa sebanyak mungkin. Partai ini berusaha menjadi pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Kedua, Partai Kader. Partai kader merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai ini sangat ketat dan struktur organisasinya hirarki

## 3) Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik bisa digolongkan berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, parpol dapat dibagi menjadi empat tipe. Pertama, Partai Politik beranggotakan lapisan-lapisan sosial, seperti kelas atas, menengah dan bawah. Kedua Partai Politik yang anggotanya berasal dari kalangan tertentu seperti petani, buruh dan lain-lain. Ketiga, Partai Politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keempat, Partai Politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*, 155-156

### 3. Politik Aliran

Politik aliran adalah kelompok sosio-budaya yang menjelma menjadi sebagai organisasi politik.<sup>21</sup> Kemudian manifestasi daripada organisasi politik bisa berbentuk politik aliran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Serikat Buruh, Gerakan Sosial, dan lain sebagainya. Politik aliran dan partai politik dapat dikatakan bahwasanya keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Seperti partai politik yang menjadi representasi dari politik aliran, politik aliran yang menjadi ideologi partai politik, serta politik aliran sebagai wadah partai politik.

Geertz memaparkan aliran sebagai suatu partai politik yang dikelilingi oleh satuan organisasi-organisasi sukarela yang formal maupun tidak formal berkaitan dengannya. Aliran adalah pengelompokan organisasi secara nasional yang menganut arah dan posisi ideologis yang sama.<sup>22</sup>

Pada tahun 1950-an, Clifford Geertz menemukan empat aliran politik besar dalam masyarakat Jawa yaitu: PNI yang mewakili golongan priyayi, PKI yang mewakili golongan abangan, Masyumi yang mewakili golongan santri modernis dan, serta NU yang merupakan santri tradisional.<sup>23</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan, kehadiran partai-partai politik mendapatkan legalitas melalui Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta, tanggal 3 November 1945. Dalam Maklumat itu tertera antara lain: Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai

---

<sup>21</sup> William R Liddle dalam Alatas, Salim. "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009." *Kom & Realitas Sosial: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1.1 (2010): 27.

<sup>22</sup> Alatas, Salim. "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009." *KOM & REALITAS SOSIAL* 1.1 (2010), 39.

<sup>23</sup> Alatas, Salim. "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009, 3.

politik kerana dengan partai-partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat. Maklumat Pemerintah itu disambut hangat oleh rakyat dengan membentuk berbagai macam partai, dalam kurun waktu 5 tahun (1945-1950) tercatat 27 partai dengan ideologi atau aliran baik secara jelas maupun tidak jelas dari perspektif ideologi kepartaian.<sup>24</sup>

Pada pemilu 1955 yang berlangsung 29 desember untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 yang diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante menghasilkan 5 (lima) besar partai yakni (1) PNI yang beraliran Nasionalis, (2) Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) beraliran Islam “Modernis”, (3) Nahdhatul ulama (NU) beraliran Islam ‘tradisional’, (4) PKI beraliran komunis marxis, dan (5) PSII yang beraliran Islam “normatif”.<sup>25</sup>

Teori politik aliran Geertz masih relevan untuk membantu memahami dinamika politik sosial. Terutama dalam bagaimana Identitas Sosial dan budaya masih mempengaruhi preferensi politik. Namun, teori ini perlu diperluas dan disesuaikan klasifikasinya dengan konteks modern. Berikut dua poin yang ikut menunjang;

a. Identitas Sosial yang berkelanjutan

Identitas keagamaan, etnis, dan budaya yang diidentifikasi oleh Geertz dalam politik aliran masih memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Meskipun pengelompokan tradisional mungkin telah berubah,

---

<sup>24</sup> Sigit Pamungkas, “Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia” dalam Partai Politik dan Sistim Demokrasi di Indonesia, ed. Aiyub Mohsin (Yogyakarta: Jurnal Populis, 2018), 778.

<sup>25</sup> Muksin, Ayub. "Partai Politik dan Sistim Demokrasi di Indonesia." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3.2 (2018): 777-788.

identitas ini tetap menjadi faktor penting dalam mobilisasi politik dan dukungan partai.

b. Fragmentasi Politik

Politik Indonesia tetap terfragmentasi berdasarkan identitas dan kelompok sosial. Partai-partai politik sering kali mengandalkan basis dukungan yang memiliki identitas tertentu, baik itu berbasis agama, etnis, atau ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa politik aliran masih relevan dalam bentuk yang lebih modern.

4. Trikotomi Santri, Priyayi dan Abangan

Istilah kosakata diatas yaitu Santri, Priyayi dan Abangan merupakan kosakata yang dikenalkan Geertz dalam bukunya, *The Religion of Java*. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku keberagamaan, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain dari pada itu, ketiganya juga memiliki pengertian yang berbeda-beda berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian. Menurut Geertz agama bukan hanya sebatas hubungan antara manusia dan tuhan. Namun, disisi lain juga dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya. Simbol-simbol yang dimunculkan kerap kali berbeda jauh dari hubungan manusia dan tuhannya, melainkan sengaja diciptakan oleh manusia karena dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Dalam kesimpulan Geertz, Santri digambarkan sebagai mereka yang menjalankan perintah ajaran islam dan menempati pasar. Abangan adalah varian yang secara umum merupakan mereka yang berprofesi sebagai petani, pengrajin dan buruh-buruh kecil

serta memegang kuat faham animisme seperti selamatan, kepercayaan terhadap makhluk halus, serta hal-hal yang bernuansa mistik Jawa lainnya.

Terakhir adalah Priyayi. Priyayi digambarkan Geertz sebagai orang yang menduduki birokrasi pemerintahan. Sifat sopan santun, seni tinggi, dan mistisme intuitif yang memiliki kaitan erat dengan kekeratonan Hindu-Jawa menjadi ciri khas dari varian Priyayi.<sup>26</sup>

a. Santri

Bagi seorang Santri, ritus ibadah merupakan hal yang benar-benar penting hingga menjadikan sembahyang sebagai identitas terhadap mereka yang benar-benar santri atau bukan. Jenis santri beraneka ragam, mulai dari santri yang mengidentifikasi diri sebagai golongan yang bukan abangan, sampai menjadikan Islam sebagai dominasi dari hampir seluruh kehidupan.<sup>27</sup>

Dari ketiga varian yang dikelompokkan Geertz, Santri dan Abangan adalah varian yang memiliki perbedaan yang paling mencolok. Hal ini bisa dilihat dari sikap mereka terhadap adat keagamaan. Dimana Santri lebih cenderung akan iman terhadap Islam. Sementara Abangan cenderung pada sifat relativisme dan keterkaitan yang kurang terhadap laku keagamaan mereka.

Dalam berpolitik, Santri Mojokuto umumnya menjadi anggota Masyumi atau Nahdhatul Ulama, atau menganggap diri mereka sebagai

---

<sup>26</sup> Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa", DIALEKTIKA, Vol. 9, No. 2, (Januari-Desember 2015), 39.

<sup>27</sup> Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, terj. Aswab Mahasin & Bur Rasuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 179-180

pengikut salah satu dari kedua organisasi tersebut. Bagi mereka, partai politik bukan sekadar kelompok rakyat yang memilih partai yang sama, melainkan merupakan organisasi sosial, persaudaraan, rekreasi, dan keagamaan. Partai politik Islam dianggap sebagai wadah yang menggabungkan ikatan kekeluargaan, ekonomi, dan ideologi, serta mendesak komunitas untuk mendukung nilai-nilai sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Menjadi anggota partai politik Islam berarti mengikatkan diri pada penafsiran doktrin sosial Islam yang berbeda-beda.<sup>28</sup>

b. Priyayi

Jika kaum abangan adalah petani Jawa, maka Priyayi adalah golongan ningratnya. Agama Abangan mewakili sintesis petani aliran unsur yang diterimanya dari kota dan warisan kesukuannya, sinkretisme berbagai potongan tus dari selusin sumber yang disusun menjadi satu kumpulan utuh untuk melayani kebutuhan masyarakat.<sup>29</sup>

Tiga poin utama kehidupan "keagamaan" priyayi meliputi etiket, seni, dan praktik mistik. Ketiga faktor ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Etiket mencakup adat yang pantas dalam pergaulan dan memberikan dimensi spiritual pada perilaku sehari-hari. Seni mengungkapkan makna melalui gerak dan pola pikir yang terdisiplin. Praktik mistik mengarahkan pikiran dan perasaan menuju sumber-sumber

---

<sup>28</sup> Geertz, Agama Jawa, 231-232.

<sup>29</sup> Geertz, Agama Jawa, 329.

spiritual untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi. Unsur yang mengikat ketiganya menjadi satu adalah apa yang disebut sebagai "rasa" dalam budaya Jawa, yang merupakan modus berbeda dari realitas yang sama.<sup>30</sup>

Orientasi keagamaan priyayi sulit dibedakan dengan abangan daripada dengan santri karena perubahan agama dari politeisme Asia Tenggara ke monoteisme Timur Tengah lebih signifikan daripada pergeseran agama ke panteisme Hindu-Buddha. Ciri-ciri yang akan saya bahas dalam kategori priyayi juga berlaku untuk kelompok lain. Misalnya, orkes gamelan dan pertunjukkan wayang tidak eksklusif bagi priyayi, tetapi pemeliharaannya, penjelasan makna filosofis, dan aspek keagamaannya lebih terfokus pada priyayi. Oleh karena itu, gaya hidup ningrat yang mencakup hal-hal tersebut dianggap sebagai model kehidupan yang beradab oleh sebagian anggota masyarakat, termasuk santri, meskipun dengan beberapa rasa enggan.<sup>31</sup>

c. Abangan

Geertz menggambarkan Abangan sebagai varian yang memiliki ciri-ciri gemar melaksanakan upacara kecil dan sederhana yang disebut *selamatan*. Dalam slametan, berbagai orang dari berbagai latar belakang duduk bersama, termasuk tetangga, rekan kerja, sanak keluarga, arwah nenek moyang, dan dewa-dewa yang hampir terlupakan. Mereka terikat dalam sebuah kelompok sosial yang berkomitmen untuk saling tolong-

---

<sup>30</sup> Geertz, Agama Jawa, 343.

<sup>31</sup> Geertz, Agama Jawa, 337.

menolong dan bekerja sama. Slametan digunakan untuk merayakan dan menghormati berbagai peristiwa, mulai dari kelahiran, pernikahan, kematian, hingga kegiatan politik. Meskipun slametan mengalami perubahan dalam bentuk dan kurang efisien sebagai mekanisme integrasi di perkotaan, tetapi bagi kelompok abangan, seperti petani tradisional dan mereka yang terproletarisasi, slametan masih memiliki daya tarik dan kekuatannya. Upacara ini selalu melibatkan hidangan khas, dupa, doa Islam, dan pidato tuan rumah dalam bahasa Jawa yang resmi. Slametan menghadirkan suasana yang sopan dan penting meskipun sederhana dan tidak dramatis.<sup>32</sup>

#### 5. Politik Brand

*Branding* merupakan bentuk baru dari marketing politik. Branding merupakan upaya untuk membentuk citra dan personalitas pemimpin bahkan dapat membantu kandidat untuk mengubah dan memelihara reputasi serta dukungan. Sedangkan *political branding* itu sendiri merupakan suatu strategi untuk membangun suatu citra politik.<sup>33</sup>

Merek atau *brand* adalah sebuah identitas yang dibuat oleh orang-orang pemasaran agar memudahkan konsumen memilih sebuah produk. Dalam konteks politik, bagaimana masyarakat memilih partai politik sebagai sebuah identitas yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Secara

---

<sup>32</sup> Geertz, Agama Jawa, 3-4.

<sup>33</sup> Sun Fatayati. "Branding Politik Joko Widodo dalam Pilpres 2014 di Media Online." Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 27.1 (2016): 25-39.

sederhana, merek bisa disebut sebagai sebuah Kumpulan ekuitas sebuah produk.<sup>34</sup>

Branding politik menyoroti fenomena yang berkembang bahwa partai, politisi, dan pemimpin politik dapat secara berguna dikonseptualisasikan sebagai merek. Branding dalam politik dimanfaatkan aktor politik untuk menciptakan *awareness* kepada publik secara umum atau pemilih. Branding politik didefinisikan konsep, teori, dan kerangka kerja politik untuk memberikan diferensiasi dari pesaing politik dan identifikasi antara warga negara dan entitas politik. Konsep branding ini dirancang untuk pemimpin, partai dan kebijakan untuk membedakan dari persaingan. Branding ini akan membangun kepercayaan, yang kemudian mempengaruhi partisipasi politik. Branding semakin banyak digunakan dalam politik untuk menggabungkan simbolisme, ideologi, nilai, dan janji kebijakan ke dalam partai/kandidat politik. Oleh karena itu, branding ini tidak hanya dimanfaatkan oleh aktor politik tetapi juga partai politik melalui serangkaian nilai-nilai, keyakinan, dan janji. Branding semakin banyak digunakan dalam politik untuk menggabungkan simbolisme, ideologi, nilai, dan janji kebijakan ke dalam partai/kandidat politik. Oleh karena itu, branding ini tidak hanya dimanfaatkan oleh aktor politik tetapi juga partai politik melalui serangkaian nilai-nilai, keyakinan, dan janji.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wasesa, Silih Agung. *Political branding & public relations*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Hidayati, 2021)2013),1

<sup>35</sup> Hidayati, Festy Rahma. "Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5.2 (2021): 145-161.

Prinsip dasar branding yang berhasil adalah *brands* dapat menyederhanakan pesan yang ingin disampaikan sehingga pemilih paham apa yang ditawarkan, *brands* unik dan dapat dibedakan dengan jelas dari kompetitornya yang lain, *brands* memastikan bahwa tidak ada resiko yang menyertai ketika memilihnya, *brands* membawa aspirasi dan menyampaikan visi positif demi kehidupan yang lebih baik, *brands* merupakan simbol dari nilai-nilai internal organisasi yang berafiliasi dengannya, *brands* dipersepsikan kredibel dan dapat menepati janjinya sehingga upaya branding bisa berhasil diterima publik.<sup>36</sup>

#### 6. Media Sosial Instagram

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu *platform* digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.<sup>37</sup>

Instagram sendiri merupakan salah satu media sosial yang cukup efektif digunakan dalam kegiatan pencitraan diri pada kampanye digital. Instagram berdiri sejak 2010 yang diprakarsai oleh perusahaan Burbn.Inc, sebuah *start up*

---

<sup>36</sup> Mudrikah, Inneu Mutiara. "Political Branding Politisi Perempuan di Instagram: Kasus Pada Tsamara Amany Alatas.", 23.

<sup>37</sup> Hidayati, Festy Rahma. "Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: *A Conceptual Paper*." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5.2 (2021): 145-161.

yang berfokus pada pengembangan aplikasi smartphone. CEO Burbn.Inc Kevin Systrom dan Mike Kreiger pada awalnya membuat versi pertama dari Burbn.Inc, namun didalamnya masih banyak kekurangan. Pada akhirnya Kevin Systrom dan Mike Kreiger hanya memfokuskan pada bagian foto, hal inilah yang menjadi awal mulai munculnya aplikasi media sosial Instagram. Berbeda dengan facebook yang menggunakan sistem ‘teman’, Instagram lebih menggunakan sistem ‘mengikuti’ atau ‘follow’.<sup>38</sup>

Instagram bermula dari sekadar *platform* sederhana untuk berbagi foto secara “instan”, pelan tapi pasti Instagram terus dimodifikasi menjadi alat dan cara untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari berjejaring, cv dan portofolio daring, perangkat pemasaran, dan sekarang: alat politik. Suatu pergeseran dan dinamika yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh pembuatnya sekalipun ketika merilis aplikasi ini pertama kalinya. Internet sebagai motor penggerak era media sosial ini telah membuat pergeseran besar semacam itu menjadi hal yang tidak lagi mustahil untuk dicapai. Sejak diakuisisi *Facebook*—sekarang *Meta*—pada tahun 2012 lalu pengguna platform media sosial Instagram terus meningkat drastis tiap tahunnya.<sup>39</sup>

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna Instagram global mencapai 1,6 miliar pada Juli 2023. Adapun jumlah pengguna Instagram di Indonesia menjadi yang terbanyak ke-4 di dunia, dengan jumlah sekitar 103,3

---

<sup>38</sup> Abdillah, Fajar Muti, and Abraham Zakky Zulhazmi. "Kampanye digital, politik lokal, dan media sosial." *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication* 1.1 (2021), 58.

<sup>39</sup> Mohammad Ichlas El Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar, "Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)", *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2020),.170.

juta pengguna. Sementara, India masih menduduki posisi puncak dengan 332,15 juta pengguna Instagram pada Juli 2023. Posisi kedua ditempati Amerika Serikat dengan 161,7 juta pengguna, diikuti oleh Brasil 127,25 juta pengguna. Kemudian di bawah Indonesia ada Turki dengan 55,7 juta pengguna Instagram, Jepang 52,65 juta, Meksiko 44,2 juta, Jerman 32,45 juta, Inggris 32,2 juta, dan Italia 29,25 juta pengguna.<sup>40</sup>

Tidak seperti Facebook ataupun Twitter, Instagram cenderung berorientasi pada aspek visual sebagai tema besarnya dibandingkan kata-kata, Hal ini sejalan dengan temuan lain yang tidak kalah menarik yang didapatkan oleh Business Insider tahun 2019. Riset yang dilakukan terhadap 1.884 orang dengan rentang usia 13-21 tahun ini secara spesifik menunjukkan bahwa 59% responden mengakses berita politik melalui sosial media, dimana 65%-nya menempatkan Instagram sebagai sumber utama.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Cyndi Mutia Annur, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/01/indonesia-masuk-5-besar-negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak-di-dunia>, di akses tanggal 14 November 2023.

<sup>41</sup> Mohammad Ichlas El Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar, "Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019, 171.